FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DI INDONESIA (1985-2001)

Disusun oleh :

Heru Susanto

99 313 167

FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DI INDONESIA (1985-2001)

Skripsi ini

Diajukan guna memenuhi syarat jenjang Strata 1 pada

Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Heru Susanto

No. Mhs : 99313167

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2004

LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DI INDONESIA (1985-2001)

Nama	: Heru Susanto
Nomor Mahasiswa	: 99313167
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 21 April 2004

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

(Drs, Suharto, M.Si)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEFISIT ANGGARAN PEMERINTAH DI INDONESIA (1985 - 2001)

Disusun Oleh: HERU SUSANTO

Nomor Mahasiswa: 99313167

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal: 13 Mei 2004

Pembimbing Skripsi	: DRS. SUHARTO, M.SI	.....
Penguji I	: DRS. NUR FERIYANTO, M.SI	.....
Penguji II	: DRS. UNGGUL PRIYADI, M.SI	.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Drs. Suwarsono, MA

Halaman Motto

" Sungguh bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Dan bersama kesukaran pasti ada kemudahan. Karena itu apabila selesai suatu tugas, mulailah tugas yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhanmu hendaknya kau berharap".

(QS Asy Syarh : 94: 5-8)

" Keinginan adalah sumber penderitaan, tempatnya di dalam pikiran, tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya. Kita hidup mencari bahagia, harta dunia kendaraannya, bahan bakarnya budi pekerti"

(Iwan Fals)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya kecilku ini untuk :

♥ *Bapak dan ibu tercinta yang telah membesarkanku penuh kasih sayang dan doa*

♥ *kakak dan adik2ku yang telah memberikan dukungan*

♥ *Irma yang slalu kusayangi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayat serta karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penuliusan skripsi ini yang berjudul "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Defisit Anggaran Pemerintah Di Indonesia (1985-2001)".

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat yang harus kami tempuh untuk memperoleh jenjang Strata 1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga, dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan, dan dorongannya kepada :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Suharto, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Para Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi masa depan penulis.
4. Segenap Staf Kantor Badan Pusat Statistik dan Segenap Staf Kantor Bank Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu penelitian ini dalam pencarian data.
5. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah membesarkan ananda dengan kasih sayang, kesabaran dan perhatian yang tulus serta doa dan motifasi yang mengiringi setiap langkahku.....
6. Saudara-saudaraku bang Zerry, Hendri, Rio, Lia dan Opik 'bontot' yang nganngenin, makasih atas dorongan ,pengertian dan doanya.
7. Mas Fajar 'ambond' SE.....(Sorry mbond aku ngak bisa ngomong apalagi, tapi intinya makasih banget friend !!) you are the best...
8. Ade Irma tersayang, terima kasih atas kesetiaan, kesabaran dan rasa sayang yang penuh cinta dalam membantu dan memotivasi kk yang bikin kk semangat...
9. Wisma Bug family, Fahrul, Maman, Otong, Wiwit, Koploh, Ocho, Taro, Hergus, Aseng, Amo, Diki, Gun2, David terima kasih atas kebersamaannya.
10. Sahabat-sahabat sejatiku, Fajar'ambond'(makasih untuk semuanya), 'neng'Sita (makasih ya telah mendengarkanku slama ini),Wiwit'Bunda',

Ninin, Tio', Udang, Rudi, Koploh bersama kalianlah aku mengerti arti sebuah persahabatan.

11. Rekan-rekanku, Barly, Temex, Yohad, Rendi, Yudha, Azis, Danang, Simbah &anak2 Basecamp '99 ,Seluruh teman-teman angkatan '99 EP UII dan teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan dan dukungan yang telah kalian berikan.
12. Keluarga besar LAKI' Production, makasih untuk kebersamaannya dan juga memberikanku tempat untuk berkreasi dan bertukar pikiran.
13. Rama Bur.....(isi sendiri aja rit)

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon balasan atas segala amal kebaikan dan bantuan yang penulis terima. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan dengan baik, namun penulis menerima saran dan kritik yang bertujuan kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 April 2004

Penulis

Heru Susanto

Daftar Isi

Halaman Judul.....i

Halaman Pengesahan.....ii

Motto.....iii

Halaman Persembahan.....iv

Kata Pengantar.....v

Daftar Isi.....vii

Daftar Tabel.....xi

Daftar Gambar.....xii

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah.....6

1.3. Tujuan Penelitian.....7

1.4. Mamfaat Penelitian.....7

1.5. Sistematika Penulisan.....8

Bab II Gambaran Umum

2.1. Kondisi Makro Ekonomi Indonesia.....9

2.1.1. Pemerintahan Orde Lama.....10

2.1.2. Pemerintahan Orde Baru.....11

2.1.3. Pemerintahan Transisi.....13

2.1.4. Pemerintahan Reformasi.....14

2.2. Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....15

2.3. Perkembangan PDB Riil.....19

2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk.....21

2.5. Perkembangan Utang Luar Negeri.....23

Bab III Landasan Teori

3.1. Defisit Anggaran.....27

3.2.Teori Anggaran Pemerintah.....28

3.3. Komponen Anggaran Belanja Negara.....31

3.3.1. Pajak.....31

3.3.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....32

3.3.3. Transfer Pemerintah.....33

3.4. Pembiayaan Defisit Anggaran.....34

3.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri.....34

3.4.1.1. Pembiayaan Melalui Pinjaman Dari Bank Sentral.....35

3.4.1.2. Pembiayaan Dengan Penjualan Obligasi Kepada Masyarakat.....37

3.4.2. Pembiayaan Luar Negeri.....38

3.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Defisit Anggaran.....40

3.5.1. PDB Riil.....40

3.5.2. Jumlah Penduduk.....41

3.5.3. Utang Luar Negeri.....42

3.6. Teori Regresi.....43

Bab IV Metodologi Penelitian dan Hipotesis

4.1. Metodologi Penelitian.....45

4.1.1. Jenis Data dan Sumber Data.....45

4.1.2. Metode Pencarian Data.....45

4.1.3. Definisi Operasional Variabel.....46

4.1.4. Metode Analisis Data.....48

4.2. Pengujian Hipotesis dan Metode Analisis.....49

4.2.1. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t-statistik).....49

4.2.2. Pengujian Secara Serempak (Uji F-test).....52

4.2.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....53

4.2.4. Pengujian Asumsi Klasik.....54

a. Autokorelasi.....54

b. Multikolinearitas.....56

c. Heteroskedastisitas.....57

4.3. Hipotesis.....58

Bab V Analisis Data

5.1. Diskripsi Data.....59

5.2. Analisis Data.....61

5.3. Pengujian Hipotesis.....62

5.3.1. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t-test).....62

5.3.2. Pengujian Hipotesis Secara Serempak (Uji F-test).....64

5.3.3. Pengujian Koefisisen R^2.....65

5.4. Pengujian Asumsi Klasik.....65

5.4.1. Uji Multikolinearitas.....65

5.4.2. Uji Heteroskedartisitas.....66

5.4.3. Uji Autokorelasi.....67

5.5. Interprestasi.....68

Bab VI Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan.....70

6.2. Saran.....71

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Posisi Keseimbangan APBN.....3

Tabel 1.2. Pembiayaan Defisit 1998/1999-2000.....5

Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDB riil Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 1997-2001.....21

Tabel 2.2. Negara-negara Pengutang Terbesar.....25

Tabel 2.3. Perkembangan PDB riil, Jumlah Penduduk dan Utang Luar Negeri.....26

Tabel 5.1. Hasil Estimasi Persamaan Regresi.....61

Tabel 5.2. Uji Multikolinearitas Metode Klein.....66

Tabel 5.3. Uji Heteroskedastisitas.....67

Daftar Gambar

Gambar III.1. Keseimbangan Anggaran.....30

Gambar III.2. Pembiayaan Defisit Melalui Pinjaman Bank Sentral.....36

Gambar III.3. Pembiayaan Defisit Melalui Penjualan Obligasi Kepada Masyarakat.....37

Gambar IV.1. Uji t parsial positif.....50

Gambar IV.2. Uji t parsial negatif.....51

Gambar IV.3. Uji dua sisi.....52

Gambar IV.4. Uji F.....53

Gambar IV.5. Uji Autokorelasi.....55

Gambar V.1. Hasil Uji Autokorelasi.....67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pola kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Ada dua macam kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara pengendalian sektor moneter, khususnya jumlah uang beredar, sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara pengendalian anggaran (APBN).

Pada umumnya negara sedang berkembang seperti juga Indonesia, mempunyai perekonomian yang cukup terbuka dan peran pemerintah sebagai *agent of development* yang sangat besar terutama melalui peralatan anggarannya. Pengalaman sebelum orde baru telah memberikan pelajaran bahwa kebijakan anggaran defisit telah membawa perokonomian kita dalam keadaan inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian tidak berkembang dan mengalami kemacetan yang diikuti oleh kekacauan sosial dan politik. Berdasarkan pengalaman tersebut maka pemerintah berusaha menggunakan

kebijakan anggaran yang dikenal dengan "Anggaran Belanja Seimbang dan Dinamis".

Sebagai salah satu piranti utama pelaksanaan kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memegang peranan yang sangat penting di dalam suatu perekonomian, karena selama ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan pelaksanaan pembangunan saat ini. Dengan demikian segenap langkah kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam masa tersebut pada hakekatnya merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dalam proses pembangunan jangka panjang.

Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rincian kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan yang dinyatakan dalam rupiah, dan merupakan penjabaran dari GBHN dan repelita. Bentuk dan struktur anggaran berimbang yang dianut oleh pemerintah orde baru mengandung arti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Meskipun demikian keseimbangan dalam anggaran tersebut oleh dana luar negeri disisi penerimaan, bukan oleh penerimaan rutin. Dengan demikian sebenarnya anggaran yang ditempuh adalah anggaran defisit. Hal ini karena seluruh penerimaan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai seluruh anggaran belanja negara. Defisit anggaran yang bersangkutan ditutup dengan bantuan luar negeri yang dalam anggaran digolongkan sebagai penerimaan pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu: sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan, sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Suatu anggaran pemerintah dikatakan defisit apabila seluruh penerimaan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai seluruh anggaran belanja negara.

Tabel 1.1. Posisi Keseimbangan APBN (milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri (Milyar Rp)	Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp)	Defisit/Surplus (Milyar Rp)
1985	16.065,4	19.637,4	3.572
1986	16.892,3	22.643,3	5.751
1987	19.383,4	25.539,4	6.156
1988	20.077,3	30.062,3	9.985
1989	31.384,9	40.810,9	9.426
1990	34.789,7	44.692,7	9.903
1991	40.409,3	50.816,3	10.407
1992	47.797,6	58.511,6	10.714
1993	51.270,5	62.022,5	10.752
1994	61.359,8	72.342,8	10.983
1995	68.469,4	80.258,4	11.789
1996	78.203,4	90.616,4	12.413
1997	107.727,6	131.544,6	23.817
1998	134.302,5	230.626,6	96.324,1
1999	129.203,8	212.699	83.495,2
2000	152.896,5	197.030,3	44.133,8
2001	263.226,5	315.756	52.529,5

Sumber: BPS, Nota keuangan dan RAPBN

Realisasi pembiayaan defisit anggaran dalam tahun anggaran 1998/1999 mencapai Rp. 16.199,0 milyar (1,5 persen dari PDB) yang berasal dari pembiayaan nonperbankan dalam negeri Rp. 1.634,0 milyar (0,2 persen

dari PDB) melalui hasil privatisasi BUMN, dan pembiayaan dalam negeri (bersih) Rp. 20.998,2 milyar (2,0 persen dari PDB). Dari pembiayaan dalam dan luar negeri tersebut menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 6,433,2 milyar (0,6 persen dari PDB) pada pembiayaan perbankan.

Seiring dengan meningkatnya volume APBN, realisasi pembiayaan defisit anggaran dalam tahun anggaran 1998/1999 juga mengalami poeningkatan menjadi Rp. 31.698,0 milyar (2,8 persen dari PDB). Jumlah tersebut dihasilkan dengan pembiayaan luar negeri (bersih) Rp. 28.121,8 milyar (2,5 persen dari PDB) dan pembiayaan nonperbankan dalam negeri Rp. 16.613,3 milyar (1,5 persen dari PDB). Pembiayaan nonperbankan dalam negeri tersebut dihasilkan dari privatisasi BUMN Rp. 3.727,2 milyar (0,3 persen dari PDB) dan *asset recovery* Rp. 12.886,1 milyar (1,1 persen dari PDB). Adanya kelebihan pembiayaan defisit anggaran menyebabkan timbulnya saldo lebih pembiayaan anggaran Rp. 13.037,1 milyar.

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2000, pembiayaan non perbankan dalam negeri diperkirakan mencapai Rp. 21.900,0 milyar (2,3 persen dari PDB), yang berasal dari privatisasi BUMN Rp. 3.000,0 milyar (0,3 persen dari PDB) dan *asset recovery* Rp. 18.900 milyar (2,0 persen dari PDB). Sedangkan pembiayaan luar negeri (bersih) realisasinya diperkirakan mencapai Rp. 10.776,5 milyar (1,1 persen dari PDB). Dari keseluruhan pembiayaan defisit tersebut diperkirakan akan menghasilkan saldo lebih pembiayaan anggaran Rp. 617,9 milyar. Dalam APBN 2000, pembiayaan dari luar negeri

direncanakan Rp. 27.329,8 milyar, yang dirinci dalam bentuk pinjaman program Rp.11.299,8 milyar dari pinjaman proyek Rp. 16.030.0 milyar. Selanjutnya, perkembangan pembiayaan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
Pembiayaan Defisit, 1998/1999-2000 (Milyar rupiah)

Uraian	1998/1999				1999/2000			
	APBN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB	APBN	% thd PDB	Realisasi	% thd PDB
I. Pembiayaan dalam negeri	15.000,0	1,6	(4.799,1)	(0,5)	30.000,0	2,5	3.576,3	0,3
A. Pembiayaan perbankan dlm negeri	-	-	(6.433,1)	(0,7)	-	-	(13.037,0)	(1,1)
B. Pembiayaannon perbankan dlm negeri.	15.000,0	1,6	1.634,0	0.2	30.000,0	2,5	16.613,3	1,4
1. Privatisasi	15.000,0	1,6	1.634,0	0,2	13.000,0	1,1	3.727,2	0,3
2. Penjualan asset program Restrukturisasi perbangkan.	-		-	-	17.000,0	1,4	12.886,1	1,1
II. Pembiayaan LN (bersih)	81.324,1	8,5	20.998,2	2,0	53.495,2	4,4	28.121,8	2,5
A. Penarikan pinjaman LN bruto	114.585,6	12,0	51.044,9	4,9	77.400,0	6,3	48.382,2	4,3
1. Pinjaman Program	74.044,7	7,8	24.925,7	2,4	47.400,0	3,9	25.200,9	2,3
2. Pinjaman Proyek	40.540,9	4,2	26.119,2	2,5	30.000,0	2,5	23.181,3	2,0
B. Pembayaran pokok utang LN (Amortisasi)	(33.261,5)	(3,5)	(30.046,7)	(2,9)	(23.904,8)	(2,0)	(20.260,4)	(1,8)
Jumlah	96.324,1	10,1	16.199,1	1,5	83.495,2	6,8	31.698,1	2,8

Sumber: Nota Keuangan dan APBN

Pengelolaan anggaran yang mengandalkan pembiayaan dari luar negeri ternyata telah mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi rentan sekali terhadap perkembangan makroekonomi dunia, khususnya perubahan nilai mata uang internasional. Pada tahun 1997-2001 perkembangan nilai defisit anggaran dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang semakin tinggi. Puncak dari masalah tersebut adalah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Dengan adanya kejadian tersebut memaksa pemerintah untuk melakukan redesign atas kebijakan makroekonominya, khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Hingga tahun 2001, permasalahan kemandirian pembiayaan pembangunan belum juga dapat diatasi oleh pemerintah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan sejauh mana pokok-pokok masalah penelitian ini akan dibahas, antara lain adalah:

1. Apakah PDB riil, Jumlah penduduk, dan Utang luar negeri secara bersama-sama mempengaruhi defisit anggaran ?
2. Seberapa besar pengaruh PDB riil terhadap defisit anggaran pemerintah di Indonesia ?
3. Seberapa besar pengaruh Jumlah penduduk terhadap defisit anggaran pemerintah di Indonesia ?
4. Seberapa besar pengaruh Utang luar negeri terhadap defisit anggaran pemerintah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis apakah PDB Riil, jumlah penduduk, dan utang luar negeri secara bersama-sama mempengaruhi defisit anggaran
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh PDB Riil terhadap defisit anggaran pemerintah.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap defisit anggaran pemerintah.
4. Menganalisis seberapa besar pengaruh utang luar negeri terhadap defisit anggaran pemerintah.

1.4. Mamfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini merupankan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi.

2. Bagi Pemerintah

   Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya mengenai defisit anggaran pemerintah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai masukan bagi mahasiswa atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan defisit anggaran pemerintah.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi enam bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Umum

Menguraikan tentang kondisi makro ekonomi Indonesia, yang meliputi perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), PDB riil, Jumlah penduduk, dan Utang luar negeri

Bab III. Landasan Teori

Memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV. Metodologi Penelitian dan Hipotesis.

Memuat tentang metode pencarian dan analisis data yang dilakukan serta beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

Bab V. Analisis Data

Menyajikan hasil estimasi data melalui alat analisis yang telah disajikan.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini setelah melakukan analisis.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah kondisi fisik, lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya serta peranan pemerintah di dalam perekonomian. Faktor-faktor eksternal di antaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Untuk dapat memahami sepenuhnya sifat dari proses dan pola pembangunan ekonomi di suatu negara serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya selama kurun waktu tertentu, perlu juga diketahui sejarah ekonomi dari negara itu sendiri. Sering dikatakan bahwa keadaan perekonomian negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia, saat ini tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian atau orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan. Secara garis besar, sejarah ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode, yaitu zaman pemerintahan orde lama (1950-1966), zaman pemerintahan orde baru (1966-Mei 1998), zaman pemerintahan transisi (Mei 1998-November 1999), dan zaman pemerintahan reformasi (November 1999-2001).

2.1.1. Pemerintahan Orde Lama

Pada tahun-tahun pertama setelah merdeka, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Ekonomi nasional dapat dikatakan mengalami stagflasi. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur praktis terhenti, tingkat inflasi yang sangat tinggi. Semua ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang penting diantaranya adalah pendudukan Jepang, Perang Dunia II, perang revolusi, dan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek (Tambunan, 1991).

Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi yang disebut *dual societes*, adalah salah satu karakteristik utama dari negara-negara sedang berkembang. Dualisme di dalam struktur ekonomi seperti ini terjadi karena biasanya pada masa penjajahan pemerintah yang berkuasa menerapkan diskriminasi dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya. Diskriminasi ini sengaja diterapkan untuk membuat perbedaan dalam kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu antara penduduk asli dan orang-orang nonpribumi.

Keadaan ekonomi Indonesia, terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing di tanah air, termasuk perusahaan milik Belanda, merupakan awal dari periode ekonomi terpimpin yang mendekatkan dengan haluan sosialis. Keadaan ini membuat Indonesia

semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman modal asing, sedang untuk membiayai rekonstruksi ekonomi dan pembangunan sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Hingga akhir dekade 1960-an, sumber utama penanaman modal asing di Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan ekspor hasil perkebunan dan pertambangan serta untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait.

2.1.2. Pemerintahan Orde Baru

Perhatian pemerintah orde baru lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi sosialis. Indonesia juga kembali menjadi anggota lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Sebelum rencana pembangunan lewat repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negara. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali sektor produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh

negara-negara barat. Atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk kelompok konsorsium yang disebut *Inter Goverment Group on Indonesia* (IGGI) yang terdiri atas beberapa negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia.

Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat sejak paro pertama dekade 1980-an pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi yang diawali di sektor moneter/perbankan dan di sektor riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan adanya paket deregulasi tersebut, sistem perekonomian Indonesia secara bertahap mengalami pergeseran dari yang sangat tersentralisasi menuju desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar.

Akan tetapi, proses pembangunan selama ini boleh dikatakan tidak terlalu berhasil, bahkan dalam banyak aspek semakin memburuk. Jumlah kemiskinan, baik absolut maupun relatif masih tinggi dan tingkat kesenjangan ekonomi semakin besar. Bahkan menjelang awal 1990-an kesenjangan tersebut semakin meningkat. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan, pemerintah menjalankan berbagai macam program terutama di daerah pedesaan, seperti program inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, dan program pembinaan usaha kecil.

Penerimaan bantuan luar negeri yang diterima selama ini berasal dari negara-negara dan badan-badan internasional yang tergabung dalam IGGI, yang sejak tahun 1992 berubah menjadi *Consultative Group for Indonesia* (CGI), dan negara-negara non-CGI lainnya.

2.1.3. Pemerintahan Transisi

Pada bulan Mei 1997 nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan untuk melepaskannya. Mereka mengambil sikap demikian karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil.

Sekitar bulan september 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak bertambah buruk, pemerintah mengambil beberapa langkah kongkrit, diantaranya menunda proyek-proyek dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut. Pada awalnya pemerintah berusaha untuk menangani masalah krisis rupiah ini dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, pemerintah akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan kepada IMF.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terus melemah. Kepercayaan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang semakin merosot.

Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi, setelah pemerintahannya berjalan mulai terlihat bahwa sebenarnya pemerintahan reformasi ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menjadi-jadi dan kerusuhan dimana-mana. Akhirnya, banyak kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai pemerintahan transisi.

2.1.4. Pemerintahan Reformasi

Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor asing, menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan permasalahan yang ada di dalam negeri. Pada tahun 1999, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah mulai membaik.

Selama pemerintahan reformasi, praktis tidak ada satu pun masalah yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut. Selain itu, hubungan dengan IMF juga tidak baik, terutama karena revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Hal ini akan menaikkan tingkat *country risk* Indonesia, yang akhirnya akan membuat pelaku-pelaku bisnis, termasuk investor asing menjadi enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian nasional pada masa pemerintahan reformasi cenderung lebih buruk dari pada pemerintahan sebelumnya.

2.2. Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sebagai salah satu piranti utama pelaksanaan kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memegang peranan yang sangat penting di dalam suatu perekonomian, karena selama ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan pelaksanaan pembangunan saat ini. Dengan demikian segenap langkah kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam masa tersebut pada hakekatnya merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dalam proses pembangunan jangka panjang.

Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rincian kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan yang dinyatakan dalam rupiah, dan

merupakan penjabaran dari GBHN dan repelita yang penyusunan anggarannya dilakukan dengan cermat dan tetap dengan mengacu pada Trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Namun demikian, dalam realisasinya masih menghadapi ketidakpastian, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluarannya. Dengan keadaan itu, maka sejak awal Repelita I, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis. Namun dalam perkembangannya selama hampir lima tahun terakhir dalam pelaksanaan APBN dimungkinkan dibentuknya cadangan pada masa penerimaan negera melebihi yang direncanakan, dan dimamfaatkannya dana cadangan tersebut pada masa penerimaan negara kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan yang sangat mendesak, sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap.

Dalam kebijaksanaan umum ekonomi makro selama masa Orde Baru, APBN yang merupakan alat kebijaksanaan fiskal disusun dan dilaksanakan secara serasi dan saling menunjang dengan alat-alat kebijaksanaan ekonomi makro lainnya, yaitu kebijaksanaan moneter dan neraca pembayaran. Hasil dari kebijaksanaan tersebut adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi, yaitu sekitar 7,0 persen per tahun selama PJP I dan sekitar 8,0 persen dalam dua tahun pertama Repelita VI. Dalam fungsinya sebagai alat kebijaksanaan fiskal, APBN terdiri dari dua sisi, yaitu sisi pengeluaran yang menunjukkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam tahun tertentu, dan sisi penerimaan yang menunjukkan sumber-sumber dana yang diharapkan dapat diperoleh untuk membiayai pengeluaran tersebut. Dengan demikian, meningkatnya jumlah pengeluaran harus diikuti oleh meningkatnya jumlah penerimaan.

Sebagai pelaksanaan operasional tahun kelima Repelita VI, penyusunan APBN tahun anggaran 1998/1999 juga tetap didasarkan kepada prinsip anggaran berimbangan yang dinamis. Namun dalam pelaksanaannya, APBN tahun anggaran 1998/1999 tidak terlepas dari berbagai perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial. Dalam kaitan ini, terus memburuknya perekonomian nasional sejak pertengahan tahun 1997 berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian nasional dan telah berdampak kepada sulitnya upaya peningkatan pendapatan negara, terutama dari sektor pajak. Sementara itu, penerimaan dari sektor migas dalam beberapa waktu terakhir sulit diharap untuk meningkat, mengingat perkembangan harga minyak dunia yang cenderung melemah. Dibidang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), meskipun Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 telah diberlakukan sehingga diharapkan pengelolaan jenis penerimaan ini dapat semakin tertib, namun merosotnya perkembangan

ekonomi berpengaruh terhadap rendahnya kegiatan masyarakat yang memerlukan jasa pemerintah serta menurunnya keuntungan yang diperoleh BUMN. Kondisi tersebut semakin dipersulit, mengingat pelaksanaan privatisasi beberapa BUMN yang semula diharapkan dapat memeberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara, sampai saat ini belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam upaya mencukupi kebutuhan meningkatnya anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan, penerimaan yang bersumber dari bantuan luar negeri, baik bantuan program maupun bantuan proyek ditingkatkan. Bantuan tersebut diharapkan diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia *(World Bank)*, dan Bank Pembangunan Asia *(Asian Development Bank)*, serta dari bantuan bilateral. Sasaran penerimaan pembangunan dimaksudkan untuk dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan meningkatnya anggaran belanja negara. sehingga memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN tahun anggaran 1998/1999. Dengan demikian pada bulan Juli 1998 telah dilakukan penyesuaian kebijakan fiskal yang mendasar, yaitu dengan melakukan revisi atas APBN tahun anggaran 1998/1999, yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah disetujui dan selanjutnya disahkan sebagai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang APBN tahun anggaran 1998/1999. kebijakan tersebut dimaksudkan agar sasaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 1998/1999 dapat dilaksanakan secara wajar

dan sejalan dengan perkembangan dan perubahan keadaan, serta dapat mendukung program reformasi dan stabilisasi dibidang ekonomi. Langkah kebijakan dimaksud juga merupakan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap perekonomian Indonesia.

2.3. Perkembangan PDB riil

Kinerja ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir sampai tahun 1996 cukup menggembirakan, PDB riil tumbuh rata-rata sekitar 7 persen pertahun dan inflasi dapat dikendalikan pada tingkat satu digit. Pendapatan per kapita meningkat secara berarti, dari sekitar dibawah US $ 100 pada tahun 1970 menjadi sekitar US$ 1,155 serta penduduk miskin menurun dari sekitar 60 persen dari jumlah penduduk dalam tahun 1970 menjadi sekitar 11 persen dalam tahun 1996.

Sejak terjadinya krisis moneter yaitu pada pertengahan tahun 1997 PDB riil mulai mengalami pertumbuhan yang lambat, dengan pertumbuhan sekitar 4,65 persen kemudian menurun ini berlanjut sampai dengan tahun 1998 dengan tingkat pertumbuhan minus 13,06 persen. Pada tahun 1999 dimana pada waktu itu mulai tampak tanda-tanda pemulihan ekonomi yaitu dengan pertumbuhan PDB yang positif sebesar 0,31 persen. Dari sembilan sektor yang di bahas dari PDB ternyata lima sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, sektor-sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan

penggalian dengan laju pertumbuhan minus 0,45 persen, sektor pengangkutan dan telekomunikasi minus 0,72 persen dan sektor keuangan, jasa-jasa perumahan dan persewaan sebesar minus 8,07 persen.

Sementara sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang terbesar pada tahun 1999 adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan laju pertumbuhan sebesar 8,21 persen, kemudian diikuti dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor jasa-jasa dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 2,59 persen, 2,08 persen dan 1,76 persen. Secara sektoral di tahun 2001 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dan pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,65 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,43 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,34 persen, sektor bangunan 4,21 persen, sektor industri pengolahan 4,10 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 3,42 persen, sektor jasa-jasa sebesar 2,04 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,24 persen dan pertumbuhan yang paling lamban dialami oleh sektor pertanian yaitu hanya sebesar 0,98 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel.2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Laju pertumbuhan PDB riil berdasarkan sektor ekonomi tahun 1997-2001
(dalam persen)

Sektor	1997	1998	1999	2000	2001
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	0,64	0,26	2,08	1,88	0,98
2. Pertambangan dan Penggalian	1,63	-6,87	-1,71	5,51	1,24
3. Industri Pengolahan	6,23	-12,00	2,56	5,58	4,10
4. Listrik, Gas dan Air bersih	11,85	-2,19	8,21	7,56	7,65
5. Bangunan	6,42	-35,44	-1,63	5,64	4,21
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,46	-21,42	-0,43	5,67	5,34
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,43	-11,56	-0,72	8,59	7,34
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,77	-18,58	-8,07	4,59	3,42
9. Jasa-jasa	3,54	-5,17	1,76	2,33	2,04
10. PDB	4,65	-13,06	0,31	4,92	3,44

Sumber: Statistik Indonesia

2.4. Perkembangan Jumlah Penduduk

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dalam pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan. Usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk telah dilakukan

dengan cara memindahkan penduduk pulau jawa ke luar pulau jawa melalui program transmigrasi. Selain itu dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk terutama ke propinsi-propinsi dipulau jawa. Usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga telah dilakukan pemerintah melalui program Keluarga Berencana yang dimulai awal tahun 1970-an.

Pada dua sensus penduduk (SP) terakhir menunjukkan bahwa jumalh penduduk Indonesia selama kurun waktu 1980-1990 mengalami penambahan dari 147,5 juta jiwa menjadi 179,3 juta jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,98 persen per tahun. Berdasarkan sensus penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 1995, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 193,75 juta jiwa. Selama periode 1990-1995 tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk rata-rata sebesar 1,66 persen per tahun. Walaupun jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1995 telah meningkat hampir dua per tiga kali jumlah penduduk tahun 1971, namun tingkat pertumbuhan penduduk telah turun secara cepat, yaitu dari 2,32 persen pada periode tahun 1971-1980 menjadi 1,66 persen per tahun pada periode 1990-1995. penurunan laju pertumbuhan ini berkaitan dengan keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi, dan khususnya keberhasilan program Keluarga Berencana.

Jumlah penduduk pada tahun 1999 (tanpa Timor Timur) menurut proyeksi berdasarkan SUPAS 1995 mencapai sekitar 202,83 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 1998, mengalami peningkatan sebesar

1,01 persen. Jumlah penduduk tahun 2000 adalah 205,84 juta jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap sebesar 205,4 juta jiwa dan penduduk tidak bertempat tinggal tetap sebesar 421.399 jiwa.

Tingkat pertumbuhan penduduk telah turun secara cepat sejak tahun 1980, dari 1,97 persen pada periode 1980-1990 menjadi 1,49 persen per tahun selam periode 1990-2000. penurunan laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 1980 sampai sekarang ini berkaitan dengan keberhasilan program Keluarga Berencana. (Statistik Indonesia, 2001)

2.5. Perkembangan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri terjadi pada masa orde lama hingga masa sekarang. Dan diketahui bahwa pada masa orde lama, selama dua dasa warsa kekuasaannya telah "mewariskan" utang luar negeri sebanyak US$ 2,358 milyar, yang waktu itu sudah dimulai sangat banyak, bahkan warisan utang itu menjadi salah satu dari sekian "nilai negatif" untuk pemerintahan orde lama. Negatif ini bukan saja dikarenakan secara absolut nilainya pada waktu itu dikatakan sudah sangat besar, namun juga penggunaannya dinilai tidak diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Berbagai proyek mercusuar serta belanja yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, telah mengakibatkan utang tersebut lebih banyak menjadi beban karena tidak banyak artinya dalam membantu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia menimbulkan pengaruh jangka panjang berupa beban utang yang harus ditanggung, baik utang luar negeri maupun dalam negeri. Utang dalam negeri timbul karena adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan.

Pada mulanya utang luar negeri dimaksudkan sebagai dana pendamping, selain devisa yang diperoleh dari penerimaan ekspor atau surplus perdagangan. Namun dalam perjalanannya, utang luar negeri sudah menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pemerintah tidak mampu melepaskan diri dari jerat utang luar negeri. Kebijakan utang luar negeri yang ditempuh pemerintah dilandasi oleh berbagai alasan, antara lain terbatasnya tabungan dalam negeri menyebabkan masih dibutuhkannya bantuan dari luar untuk proses pembangunan dan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk merangsang penanaman modal, khususnya modal asing (PMA).

Dalam laporan BI tahun 2001 disebutkan bahwa posisi utang luar negeri total Indonesia sebesar US$133 milyar yang terdiri dari US$75 milyar (56%) utang pemerintah dan US$57 milyar (42%) utang swasta. Jika dibandingkan dengan negara-negara pengutang terbesar, pada tahun 1998 Indonesia berada diurutan kelima setelah Brazil, Rusia, Mexico, dan Cina dengan total utng luar negeri sebesar US$150.886 jut. Untuk kawasan Asia, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara pengutang terbesar setelah Cina dengan selisih tipis (US$154.599 juta). Namun jika jumlah utang luar

negeri tersebut dibandingkan dengan pendapatan nasional masing-masing negara, terlihat bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara pengutang terbesar.

Tabel 2.2
Negara-negara pengutang terbesar

Negara	1998	
	Posisi (US$ juta)	Rasio thd PNB (%)
Brasil	232.004	31
Rusia	183.601	69
Mexico	159.959	42
Cina	154.599	16
Indonesia	150.875	176
Argentina	144.050	49

Sumber: World Debt Table

Dengan terus membesarnya utang luar negeri Indonesia disajikan pada tabel.2.3 maka kewajiban pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri semakin tinggi dan sangat membebani anggaran belanja pemerintah. Sedangkan anggaran pemerintah tersebut sumber penerimaannya sebagian besar berasal dari pajak yang ditarik dari masyarakat. Dengan demikian, beban utng luar negeri pada akhirnya harus dibebankan pada masyarakat luas, dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya. Lebih dari itu, pembayaran bunga dan cicilan utang tersebut berarti mengurangi dana pembangunan yang tersedia. Akibatnya, aktivitas pembangunan pun terpaksa dikendurkan untuk memenuhi kewajiban internasional tersebut. Demikian pula fungsi alokasi dan

distributif dari kebijakan fiskal menjadi berkurang, sebagai akibat alokasinya sebagian besar dana untuk membayar bunga dan cicilan utang ini.

Tabel 2.3
Perkembangan PDB riil, Jumlah Penduduk dan Utang luar negeri Indonesia

Tahun	PDB riil (Milyar rupiah)	Jumlah penduduk (Juta jiwa)	Utang luar negeri (Juta US$)
1985	200.857,70	163.39	35.157
1986	212.633,20	166.94	41.592
1987	223.107,40	170.18	49.529
1988	236.004,10	175.59	50.720
1989	253.601,90	179.14	52.400
1990	271.968,10	179.30	63.953
1991	291.563,40	181.38	65.697
1992	309.659,10	184.49	73.360
1993	329.775,80	187.30	80.592
1994	354.640,80	190.68	96.500
1995	383.792,30	193.75	106.831
1996	413.797,90	196.81	110.171
1997	433.245,90	197.81	136.088
1998	376.374,90	200.75	150.886
1999	379.657,70	202.83	146.939
2000	397.666,30	205.84	141.693
2001	411.132,20	208.90	133.074

Sumber: - Nota Keuangan dan APBN
- Bank Indonesia
- Statistik Indonesia

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Defisit Anggaran

Kebijaksanaan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan aggregat (khususnya permintaan swasta). Kebijakan fiskal yang sering juga disebut "politik fiskal". atau *fiskal policy*, biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena anggaran belanja negara, terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa *"government expenditure"* dan *"government transfer"*, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintahan yang berupa tindakan memperbesar dan memperkecil jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil "*government expenditu*re" memperbesar atau memperkecil "*government transfer*" yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian (Soediyono, 2000:98).

Dalam menjalankan kebijakan ekonomi makro khususnya kebijakan fiskal, pemerintah mengadopsi prinsip anggaran berimbang. Kebijakan anggaran belanja pemerintah ialah dalam APBN besarnya penerimaan

pembangunan harus sama dengan pengeluaran pembangunan. Yang dimaksud anggaran belanja berimbang dan dinamis, adalah :

- Anggaran berimbang, mengharuskan sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran.
- Dinamis, menunjukkan bahwa anggaran dapat disesuaikan dengan keadaan penerimaan pemerintah, dapat dirubah atau direvisi. Pada revisi anggaran, sisi pengeluaran dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kondisi penerimaan pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Selama ini sebenarnya anggaran belanja pemerintah tidak pernah berimbang melainkan terjadi defisit anggaran. Yang dimaksud dengan defisit anggaran adalah seluruh penerimaan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai seluruh anggaran belanja negara (Suparmoko, 1984).

3.2. Teori Anggaran Pemerintah (Nopirin, 1987)

Pemerintah menggunakan anggaran untuk mengendalikan dan mencatat masalah-masalah fiskalnya. Suatu anggaran menunjukkan rencana pengeluaran program-program pemerintah dan penerimaan yang diperkirakan akan diterima sistem perpajakan, untuk suatu tahun tertentu. Pada suatu tahun tertentu, pada umumnya pemerintah pernah mengalami surplus atau defisit anggaran. Surplus anggaran terjadi apabila seluruh penerimaan pajak dan

penerimaan lainnya melebihi pengeluaran pemerintah, sebaliknya defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pajak. apabila penerimaan pajak dan pengeluaran sama besarnya maka anggaran pemerintah dalam keadaan berimbang. Indikator yang biasa dipakai untuk kebijakan fiskal ini adalah *budget defisit*.

Jika dinotasikan, surplus anggaran (BS):

$$BS = tY + R - G$$

Dimana : t = pajak,

Y = pendapatan nasional,

R = pengeluaran untuk transfer,

G = pengeluaran pemerintah

sebaliknya defisit anggaran adalah:

$$BD = - BS = G - tY + R$$

Dimana BD adalah Defisit Anggaran.

Namun demikian, perumusan yang sederhana ini kurang tepat. Defisit ini bukan merupakan indikator yang tepat bagi kebijakan fiskal. Hal ini disebabkan, pertama, penerimaan pajak dan transfer tergantung pada pendapatan. Oleh karena itu semua faktor yang mempengaruhi pendapatan tentu akan mempengaruhi defisit. Dengan demikian defisit ini tidak lagi merupakan variabel eksogen. Pemerintah dapat mempengaruhi defisit anggaran dengan merubah G, t atau R, tetapi ini semua bukan merupakan

satu-satunya faktor, misalnya iklim investasi, akibatnya akan menurunkan pendapatan (Y). Turunnya pendapatan akan mengurangi penerimaan pajak.

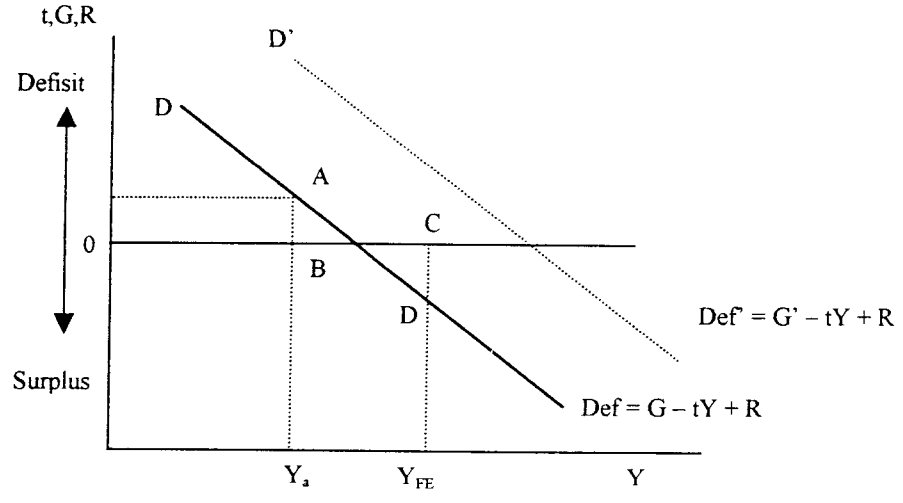

Gambar III.1. Keseimbangan Anggaran

Pada gambar III.1. di atas, apabila pendapatan nasional adalah Y_a , maka defisitnya sebesar AB dan apabila pendapatannya Y_{FE} maka pada tingkat pajak dan pendapatan tertentu menunjukkan surplus sebesar CD. Pengaruh kebijakan fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut. kebijakan fiskal yang ekspansif (apakah dengan menaikkan G atau menurunkan tingkat pajak) menggeser kurva D menjadi D'. Defisit mungkin naik (tergantung dari seberapa besar kanaikan pendapatan sebagai akibat kebijakan fiskal). Bahwa pajak, pengeluaran pemerintah dan transfer mempunyai multiplier yang berbeda-beda, sehingga mungkin terjadi pemerintah dapat mendorong atau mengurangi kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Yang penting dalam

memilih indikator ini adalah bahwa indikator tertebut harus sejalan dengan kebijakan fiskal, artinya indikator harus menunjukkan kenaikan apabila kebijakan fiskal sifatnya ekspansif dan menunjukkan penurunan apabila kebijakan fiskal sifatnya kontraktif.

3.3. Komponen anggaran belanja negara

Seperti telah disebutkan semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian adalah melalui anggaran belanja negara.

Anggaran pendapatan belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, yaitu:

a. Penerimaan, terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak.

b. Pengeluaran, terdiri dari pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran untuk transfer.

3.3.1. Pajak.

Pajak biasanya dimaksudkan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah dimana terhadap penyerahan uang atau daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung. Pajak yang terpungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bentuknya sangatlah beraneka ragam, meliputi antara lain pembuatan dan pemeliharaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, tempat-tempat ibadah,

rumah-rumah sakit, memajukan pendidikan, menggaji para pegawai negeri dan sebagainya lagi yang semuanya itu bermanfaat bagi masyarakat dimana para pembayar pajak merupakan para anggota-anggotanya, maka dapatlah kita katakan bahwa pembayar pajak akan mendapatkan balas jasa juga akhirnya, meskipun balas jasa tersebut sifatnya tidak langsung dalam arti bahwa hubungan antara balas jasa yang diperoleh si wajib pajak dengan pajak yang di bayarnya, baik dalam jumlahnya maupun dalam waktu pelaksanaannya, tidak mempunyai suatu pola tertentu.

Dalam APBN sistem perpajakan yang diasumsikan digunakan adalah sistem perpajakan yang mempunyai sifat *"built-in flexible"*, yakni pajak yang besar kecilnya ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional, maka penerimaan pemerintah diasumsikan hanya dari pajak dan semua hasil pungutan pajak seluruhnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Soediyono, 2000:181)

3.3.2. Pengeluaran konsumsi pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa hanya disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase*, meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana pemerintah secara langsung menerima balas-jasanya.

Dengan pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji para pegawai negeri, misalnya, pemerintah langsung memperoleh balas-jasa berupa prestasi kerja dari pegawai-pegawai tersebut. Pembeli barang-barang dan

jasa-jasa dalam berbagai bentuknya, dari yang nilainya bermilyar rupiah sampai kepada yang nilainya hanya beberapa rupiah yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk kategori ini. Dengan sendirinya masyarakat mengharapkan bahwa semua macam pengeluaran pemerintah tersebut, secara langsung atau tidak langsung, nantinya akan dapat diperoleh mamfaatnya oleh para anggota masyarakat pada umumnya. Pengeluaran-pengeluaran konsumsi pemerintah inilah yang jumlah keseluruhan persatuannya waktu ditandai dengan "G".

3.3.3. Transfer Pemerintah

Transfer pemerintah atau "government transfer" disebut juga sebagai pengeluaran pemerintah tanpa balas-jasa langsung dan ditandai dengan "Tr".

Beberapa contoh bentuk transfer pemerintah dapat disebutkan antara lain :

a. Sumbangan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang menderita sebagai akibat adanya bencana alam.
b. Sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada para penganggur.
c. Uang pensiun yang diterima oleh para pegawai negeri yang telah pensiun.
d. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan.

e. Bea-siswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa, dan sebagainya lagi.

Dari beberapa bentuk transfer pemerintah dapat dilihat bahwa dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut pemerintah tidak menerima balas-jasa secara langsung (Soediyono, 2000:96).

3.4. Pembiayaan Defisit Anggaran

Pada prinsipnya, pembiayaan defisit anggaran dapat diupayakan dari dua sumber utama, yaitu dalam dan luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari perbankan dalam negeri dan non-perbankan dalam negeri. Pembiayaan dari perbankan dalam negeri tersebut antara lain berupa pinjaman (kredit) perbankan dan penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu, sumber pembiayaan non-perbankan dalam negeri dapat diperoleh dari hasil divestasi saham pemerintah pada BUMN dalam bentuk penerimaan privatisasi, dan penjualan aset dalam program restrukturisasi perbankan (*asset recovery*).

Sumber pembiayaan luar negeri (bersih) merupakan penarikan pinjaman luar negeri (bruto), baik dari pinjaman program maupun pinjaman proyek, dikurangi dengan amortisasi utang luar negeri.

3.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri.

Pembiayaan defisit anggaran dalam negeri berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri. Pembiayaan defisit anggaran yang berasal

dari perbankan dalam negeri dapat berupa pinjaman atau kredit bank, penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun anggaran sebelumnya yang tersimpan dalam rekening pemerintah, baik di bank umum (bank pencipta uang giral/BPUG) maupun di bank sentral (otoritas moneter). Di sisi lain, kelebihan pembiayaan defisit akan berdampak kepada penambahan simpanan dana pemerintah disektor perbankan dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran pada pelaksanaan APBN tahun anggaran yang akan datang. Sedangkan pembiayaan non-perbankan dalam negeri berasal dari penjualan aset-aset pemerintah, baik berupa saham, portofolio di BUMN, obligasi pemerintah, maupun barang tidak bergerak lainnya, serta penjualan aset dalam program restrukturisasi perbankan (*asset recovery*) (Nota Keuangan dan RAPBN, 2000:IV/64).

3.4.1.1. Pembiayaan melalui pinjaman dari bank sentral.

Untuk menyederhanakan analisanya, kita gunakan anggapan pertama defisit hanya untuk satu periode (satu tahun) dan kedua perkiraan (*expectation*) menyesuaikan terhadap kenyataan yang lalu sehingga kurva penawaran agregat bergeser ke kiri atas apabila masyarakat telah menyesuaikan perkiraan harga atas dasar kenaikan harga periode yang lalu. Gambar III.2.. menjelaskan efek pembiayaan defisit melalui pinjaman Bank Sentral.

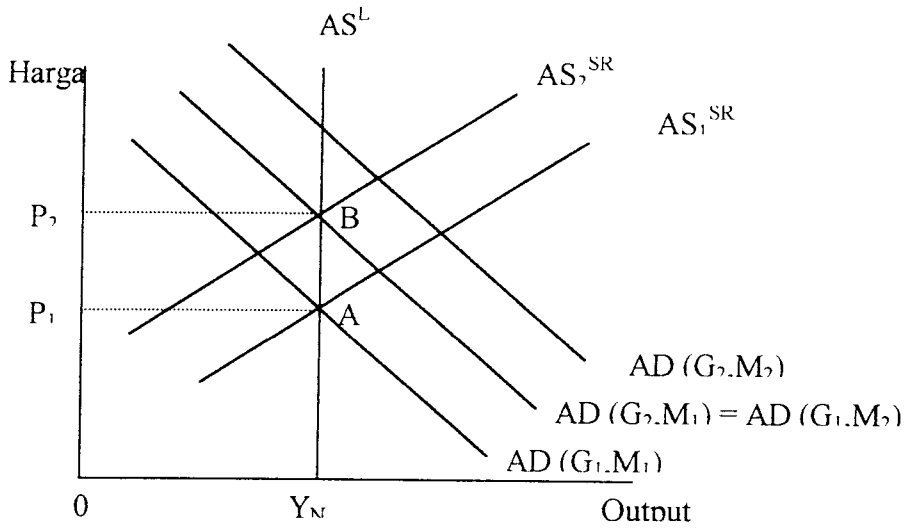

Gambar III.2.
Pembiayaan Defisit Melalui Pinjaman Bank Sentral
(Satu Periode)

Misalkan, keseimbangan mula-mula pada titik A (sebelum ada penambahan pengeluaran pemerintah). Kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar G_2 menyebabkan kurva permintaan agregat naik menjadi AD (G_2, M_1). Harga dan output naik. Namun demikian defisit ini harus dibiayai. Apabila pembiayaan ini berasal dari pinjaman Bank Sentral, jumlah uang beredar naik sehingga kurva AD bergeser ke kanan atas menjadi AD (G_2, M_2). Harga dan output naik lagi. Setelah satu periode (satu tahun) pengeluaran pemerintah kembali ke jumlah semula, tetapi jumlah uang yang beredar tetap pada tingkat M_2. Kurva AD bergeser ke kiri bawah menjadi AD (G_1, M_2). Kenaikan harga menyebabkan masyarakat menyesuaikan ekspektasi harganya,

sehingga kurva AS bergeser ke kiri atas menjadi AS_2^{SR}. Keseimbangan jangka panjang tercapai pada titik B. Dengan demikian bahwa pembiayaan defisit dengan pinjaman bank sentral akan menaikkan harga, sedang jumlah output tetap. (Nopirin, 2000:103)

3.4.1.2. Pembiayaan dengan penjualan obligasi kepada masyarakat.

Seperti halnya dengan analisa di atas, disini digunakan anggapan yang sama. Masyarakat menyesuaikan perkiraan harga setelah terjadinya perubahan harga pada periode yang bersangkutan. gambar III.3. menjelaskan efek pembiayaan defisit melalui penjualan obligasi kepada masyarakat.

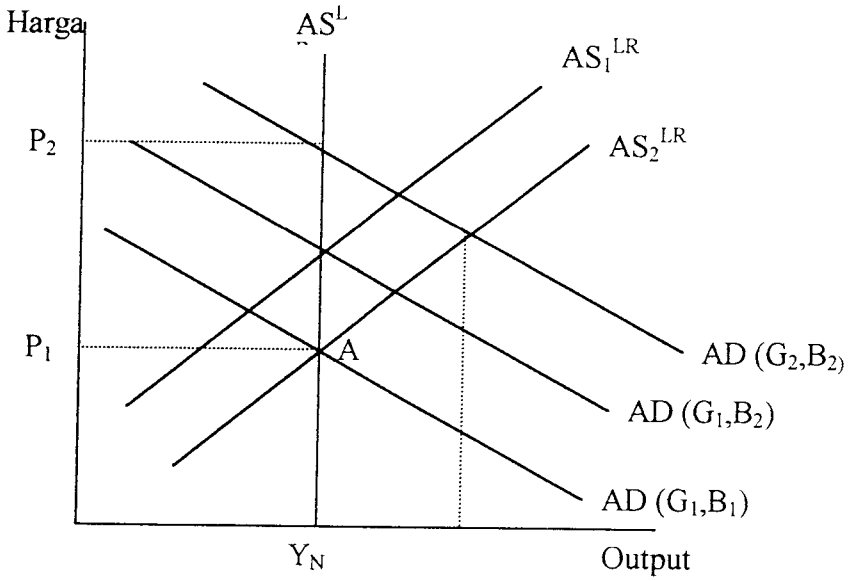

Gambar III.3.
Pembiayaan Defisit Melalui Penjualan Obligasi Kepada Masyarakat.
(Satu Periode)

Efek dari kenaikan pengeluaran pemerintah disertai dengan bertambahnya jumlah obligasi yang ditawarkan (yang akan mengakibatkan kenaikan kekayaan), akan menggeser kurva AD dari AD (G_1, B_1) menjadi AD (G_2, B_2). Harga dan output naik (efek sementara). Masyarakat akan menyesuaikan perkiraannya. Pengeluaran pemerintah akan kembali ke posisi semula, yaitu G_1. Kurva AD bergeser kembali tetapi tidak pada posisi semula AD (G_1, B_1) tetapi pada AD (G_1, B_2) sebagai akibat adanya kenaikan jumlah obligasi yang ada di masyarakat. Apabila keseimbangan jangka panjang tercapai, harga menjadi P_2 dan output tetap tidak bertambah. Kenaikan jumlah obligasi berarti beban pembayaran kupon oleh pemerintah. Jika tingkat penarikan pajak tetap, defisit akan muncul di masa mendatang. (Nopirin, 2000:106)

3.4.2. Pembiayaan luar negeri

Pembiayaan luar negeri atau bantuan asing adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Hampir semua bantuan melalui pemerintah mempunyai syarat-syarat yang longgar (konsensional) atau lunak; yakni diberikan sebagai hibah semata-mata (*grants)* atau sebagai pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan dengan jangka waktu pembayaran yang lebih lama daripada yang ditawarkan pada pasar modal swasta internasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan pinjaman-

pinjaman komersial, termasuk kredit ekspor, investasi modal (equity), dan pinjaman-pinjaman "keras" dari Bank Dunia dan bank-bank pembangunan regional. Aliran-aliran konsesional tersebut secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi atau *official development assistance (ODA)*, tetapi lazimnya dikenal sebagai bantuan luar negeri (Arsyad, 1999:166).

Dalam mengupayakan pinjaman dalam negeri, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, pemerintah senantiasa berupaya untuk mendapatkan pinjaman yang memiliki persyaratan yang ringan, yaitu tingkat bunga pinjaman yang rendah, masa tenggang (*grace period*) dan jangka waktu pengembalian yang panjang.

Pinjaman luar negeri berupa pinjaman program yang pemanfaatannya lebih diarahkan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional adalah dana yang dapat segera dicairkan (*fast disbursing assistence*). Pinjaman ini dalam beberapa tahun terakhir diperoleh dari Bank Dunia (*International Bank for Reconstruction Development/IBRD*), Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*), dan Jepang dengan Miyazawa Plan-nya melalui lembaga *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, yang merupakan lembaga hasil penggabungan JEXIM dan OECF pada akhir tahun 1999 (Nota keuangan dan RAPBN, 2000:IV/68).

3.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi defisit anggaran.

3.5.1. PDB Riil

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas harga berlaku maupun harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Built-in stabilizer adalah salah satu komponen dalam anggaran belanja pemerintah yang secara otomatis terpengaruh oleh perubahan pendapatan sehingga akan mempengaruhi anggaran belanja. Karena pengaruh yang sifatnya otomatis inilah yang menyebabkan perubahan pendapatan tidak sebesar seandainya tidak ada pengaruh otomatis tersebut. Misalnya perpajakan (dari sisi penerimaan) yang sifatnya progresip. Apabila pendapatan nasional naik anggaran belanja juga naik (surplus)

dikarenakan penerimaan pajak naik (karena sistem pajak progresip). Kenaikan anggaran belanja (surplus) akan membantu menstabilkan perekonomian, karena penerimaan pajak yang semakin tinggi berati penurunan pendapatan (*disposabel income*) individu (Nopirin, 2000:107). Dengan semakin tinggi pendapatan nasional riil berarti kemampuan untuk menaikkan pajak (sektor penerimaan) semakin tinggi yang pada akhirnya mempengaruhi defisit anggaran akan menurun.

3.5.2. Jumlah penduduk.

Jumlah penduduk adalah jumlah keseluruhan penduduk dalam suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi akan menyebabkan berbagai masalah dan hambatan dalam upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan suatu negara khususnya negara sedang berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Berbagai masalah yang ditimbulkan akibat pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang bukan hanya mengakibatkan masalah ketenagakerjaan dan pengangguran namun juga dapat menyebabkan permasalahan komplek lainnya seperti: kualitas hidup masyarakat yang menurun dengan ditunjukkan tingkat kesehatan masyarakat buruk, merosotnya taraf pendidikan, masalah lingkungan hidup, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh

peningkatan jumlah penduduk maka mendorong pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan jalan memperbesar pengeluaran pemerintah *(espansi fiskal)* yang bertujuan untuk peningkatan aktifitas ekonomi nasional dapat mengakibatkan terjadinya gejolak perekonomian sehingga dengan tindakan yang demikian akan mendorong defisit anggaran akan semakin tinggi.

3.5.3. Utang Luar Negeri

Aliran modal ke sektor pemerintah meliputi tabungan luar negeri meliputi tabungan resmi ke sektor pemerintah dan tabungan swasta. Sebagian besar tabungan resmi berujud konsesional artinya dapat berupa hibah (*grants*) atau pinjaman lunak (*soft loans*), yang biasa berbunga rendah dengan jangka waktu pengembalian yang lebih lama. Aliran konsesional ini secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi (ODA=official Development Assistance), namun lebih populer disebut bantuan luar negeri (*foreign aid*). Karena bantuan luar negeri banyak yang harus dibayar kembali maka umumnya disebut juga utang luar negeri. (Kuncoro, 2003:248).

Bank Dunia (1992) mengklasifikasikan total utang luar negeri menjadi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penggunaan kredit IMF.. Utang jangka pendek adalah utang dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang. Utang jangka panjang umumnya berjangka waktu lebih dari satu

tahun. Penggunaan kredit IMF merupakan kewajiban yang dapat dibeli kembali (*repurchase obligations*) atas semua penggunaan fasilitas IMF.

Bagi negara-negara yang belum/tidak mampu menghimpun tabungan domestik secukupnya untuk mendorong kegiatan perekonomiannya biasanya mencari sumber pembiayaan dari negara-negara lain. Dalam pembiayaan pembangunan, sektor penerimaan dalam negeri merupakan penopang pembangunan namun dalam kenyataannya belum mampu mencukupi pengeluaran pemerintah sehingga pemerintah mengupayakan mencari pinjaman dari luar negeri. Dengan kondisi yang demikian semakin besar hutang luar negeri maka defisit anggaran akan semakin tinggi.

3.6. Teori Regresi

Istilah regresi diperkenalkan oleh Francis galton dalam hukum regresi semesta (*law of universal regression*). Untuk mencapai tujuan penelitian dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi dengan metode OLS (*ordinary least squares*) atau metode kuadrat terkecil yang dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss.

Carl Friedrich Gauss, pemula (penemu) pendekatan ini, telah menunjukkan bahwa menurut asumsi tertentu metode kuadrat terkecil menghasilkan penaksiran yang linear, tak bias dan dalam kelas semua penaksiran linear dan tak bias mempunyai varians yang minimum. Secara ringkas, penaksir tadi BLUE. (Gujarati, 1995:52)

Di dalam analisa data penelitian ini menggunakan analisa regresi log linear berganda yaitu menhubungkan beberapa variabel independen X terhadap satu variabel dependen Y. Dalam model regresi log linear berganda untuk populasi secara umum di tunjukkan dengan persamaan sebagai berikut:

$LnY = \beta o + \beta 1.LnX1 + \beta 2.LnX2 + \ldots + \beta d.LnXd + ei$

Dimana :

LnY = variabel yang besarnya tergantung harga LnX1, LnX2...LnXd

X1, X2, ... = variabel bebas/independen.

Bo = intersep

B1, β2, ... , βd = koefisien regresi

ei = variabel pengganggu yang dalam perhitungan harganya di asumsikan = 0. Harga koefisien regresi dalam model tersebut disebut dengan parameter dari model yang harga-harganya dapat dihitung jika seluruh harga populasi dari variabel Y, X1, X2, ..., Xd diketahui.

BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN DAN HIPOTESIS

4.1. Metodologi Penelitian.

Beberapa metode yang bisa ditempuh guna mendapatkan data yang dibutuhkan akan mendukung analisis ini diantaranya:

4.1.1. Jenis Data dan Sumber Data.

Didalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu jenis data yang telah ada diperoleh dari Literatur, laporan-laporan, buku-buku ataupun sumber-sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian, antara lain Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Nota keuangan dan RAPBN. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data runtun waktu/time series berujud data tahunan periode tahun 1985-2001.

4.1.2. Metode Pencarian Data.

Melalui riset kepustakaan *(Library Research)* dilakukan dengan mempelajari berupa pencatatan yaitu melakukan pencatatan-pencatatan laporan data dan studi pustaka dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari, Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN atau sumber-sumber yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan.

Data yang diperlukan:

1. PDB rill
2. Jumlah penduduk di Indonesia.
3. Utang luar negeri Indonesia.

4.1.3. Definisi Operasional Variabel.

1. Defisit anggaran belanja negara

   Defisit anggaran belanja negara adalah Seluruh penerimaan dalam negeri tidak cukup untuk membiayai seluruh anggaran belanja negara (Suparmoko, 1984). defisit anggaran terjadi apabila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan pajak. Apabila penerimaan pajak dan pengeluaran sama besarnya maka anggaran pemerintah dalam keadaan berimbang. Indikator yang biasa dipakai untuk kebijakan fiskal ini adalah *budget defisit*. Jika dinotasikan, Defisit Anggaran (BD) adalah:

   $BD = tY - G + R$

   Dimana: t = pajak

   Y = pendapatan nasional

   G = pengeluaran pemerintah

   R = pengeluaran untuk transfer

   Dalam penelitian ini digunakan data defisit anggaran pemerintah yang diperoleh dari data statistik BI dari tahun 1985-2001.

2. PDB riil

PDB riil adalah menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar atau dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku yaitu dengan menilainya kembali berdasarkan atas harga-harga pada tahun dasar tertentu *(base year).* Adapun PDB riil digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Data PDB riil yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari statistik Indonesia dari tahun 1985-2001 dengan tahun dasar 1993.

3. Jumlah penduduk.

Jumlah penduduk adalah total keseluruhan penduduk dalam periode waktu satu tahun. Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari statistik Indonesia dari tahun 1985-2001.

4. Utang luar negeri

Utang luar negeri adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah atau swasta. Bantuan melalui pemerintah mempunyai syarat-syarat yang longgar (*konsensional*) atau lunak; yakni diberikan sebagai hibah semata-mata *(grants)* atau sebagai pinjaman dengan tingkat bunga rendah dan dengan jangka waktu pembayaran yang lebih lama dari pada yang ditawarkan pada pasar modal swasta internasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan pinjaman-

pinjaman komersial, termasuk kredit ekspor, investasi modal *(equity)*, dan pinjaman-pinjaman "keras" dari Bank Dunia dan bank-bank pembangunan regional. Aliran-aliran konsesional tersebut secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi atau *official development assistance* (ODA), tetapi lebih dikenal sebagai bantuan luar negeri. Adapun data utang luar negeri (pemerintah) yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari statistik BI dari tahun 1985-2001.

4.1.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian digunakan dua analisis yaitu kualitatif dan kuantitatif, yaitu:

a. Metode kualitatif

   Metode yang berdasarkan pada analisis variabel-variabel yang tidak dapat diukur atau menggunakan analisa yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kalimat.

b. Metode kuantitatif

   Metode yang didasarkan pada analisis dengan menggunakan rumus-rumus dan teknik perhitungan yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang diteliti.

Untuk mencapai tujuan penelitian dan pengujian hipotesis maka dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi dengan data runtun waktu (*Time Series*) dari tahun 1985-2001. Analisis ini dimaksudkan untuk

mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah dengan penelitian. Dalam analisis ini digunakan metode regresi log linear.

Adapun bentuk persamaan yang digunakan adalah:

$$LnY = \beta_0 + \beta_1 LnX_1 + \beta_2 LnX_2 + \beta_3 LnX_3 + ei$$

Dimana:

LnY	=	Defisit anggaran pemerintah
β_0	=	Konstanta
LnX_1	=	PDB Riil
LnX_2	=	Jumlah Penduduk
LnX_3	=	Utang luar negeri
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
ei	=	Tingkat kesalahan

4.2. Pengujian Hipotesis dan Metode Analisis

Pengujian hipotesis statistik, yang meliputi pengujian hipotesis secara serentak (F test statistik) dan pengujian secara individual/parsial digunakan untuk meguji nilai/koefisien b1, b2, b3, b4 seberapa jauh keterwakilannya sebagai penaksir parameter.

4.2.1. Pengujian hipotesis parsial (Uji t-statistik)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t-statistik. Tujuan pengujian uji t-statistik adalah untuk menguji parameter secara parsial/individu dengan tingkat kepercayaan tertentu.

1. Uji satu sisi positif (*one tail test*)

   Hipotesis yang digunakan :

   Ho = b1 = 0

   Ha = b1 > 0

   Kriteria penerimaan :

   Ho diterima jika t-hitung < t-tabel

   Ho ditolak jika t-hitung > t-tabel

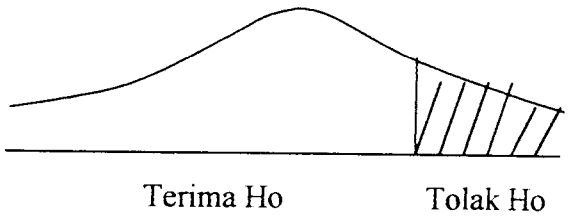

Gambar IV.1

Ditolak berarti terdapat hubungan antara variabel independen secara individual/parsial terhadap variabel dependen.

Diterima berarti tidak terdapat hubungan antara variabel independen secara individual/parsial terhadap variabel dependen.

2. Uji satu sisi negatif (*one tail test*)

   Hipotesis yang digunakan :

   Ho = b1 = 0

   Ha = b1 < 0

Kriteria penerimaan :

Ho diterima jika t-hitung > t-tabel

Ho ditolak jika t-hitung < t-tabel

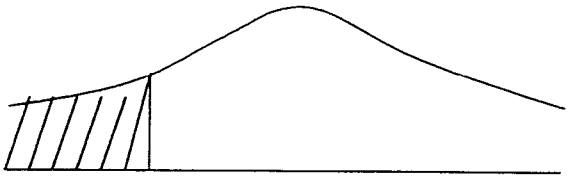

Gambar IV.2

Ditolak berarti terdapat hubungan antara variabel independen secara individual/parsial terhadap variabel dependen.

Diterima berarti tidak terdapat hubungan antara variabel independen secara individual/parsial terhadap variabel dependen.

3. Uji dua sisi (*two tail test*)

Hipotesis yang digunakan :

Ho = b1 = 0

Ha = b1 ≠ 0

$$\text{t-hitung} = \frac{\beta 1}{\text{Se}(\beta 1)}$$

Kriteria penerimaan :

Ho diterima jika t-hitung < t-tabel

Ho ditolak jika t-hitung > t-tabel

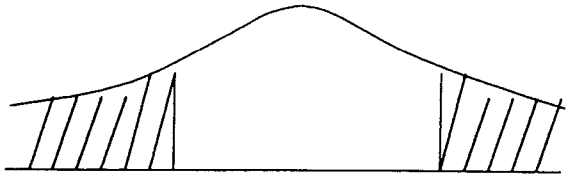

Gambar IV.3

4.2.2. Pengujian secara serempak (Uji F-test)

Penngujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Tujuan F-test statistik ini untuk mengkaji apakah model yang digunakan secara keseluruhan dapat digunakan pada tingkat kepercayaan tertentu.

Hipotesis yang digunakan adalah

Ho = semua koefisien regresi nilainya = 0

Ho = semua koefisien regresi nilainya $\neq$ 0

$$F = \frac{R^2/2}{(1-R^2)/(N-3)}$$

Kriteria uji F-test ini adalah

Ho ditolak jika F-hitung ≥ F tabel

Ho diterima jika F < F tabel

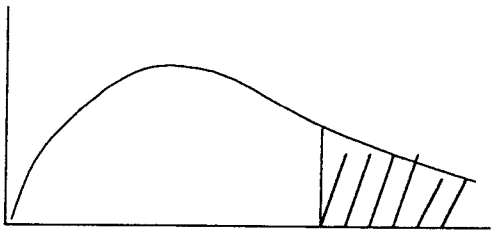

Gambar IV.4

F hitung > F tabel, Ho ditolak berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

F hitung < F tabel, Ho diterima berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

4.2.3. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 dikenal sebagai koefisien determinasi majemuk (*multiple coefficient of determination*) dan dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*) dari persamaan regresi yaitu mengukur derajad hubungan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Tingkat ketetapan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2, yang terletak pada $0 < R^2 < 1$, dan nilai R^2 diperoleh dari:

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah kuadrat regresi}}{\text{total jumlah kuadrat}} = \frac{ESS}{TSS}$$

4.2.4. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan koefisien regresi yang bersifat linear terbaik tak bias *(BLUE = Best Linear Unbiased Estimator)*, maka penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik harus dihindari.

Untuk mengetahui adanya penyimpangan asumsi klasik tersebut dilakukan pengujian terhadap hasil regresi.

a. Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti dalam data runtun waktu atau time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *croos-sectional* data) yang disebabkan oleh alamiah terjadi pada data time series (*lag*), bentuk fungsi yang salah, kekurangan/kehilangan data, adanya transformasi data, sehingga mengakibatkan varian residual menjadi tinggi, uji statistik tidak valid. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan denga menggunakan uji Durbin-Watson statistik yang dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor-faktor gangguan yang

berurutan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah persamaan mengandung autokorelasi, yaitu suatu keadaan di mana kesalahan pengganggu dalam periode tertentu saling berhubungan dengan kesalahan pengganggu dalam periode tertentu lainya. Rumus uji Durbin-Watson statistik adalah:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{t=N} (et-et_{-1})^2}{\sum_{t=1}^{t=N} e_1^2}$$

Dimana :

D = D.W. Statistik

N = Jumlah Observasi

ei = Error term

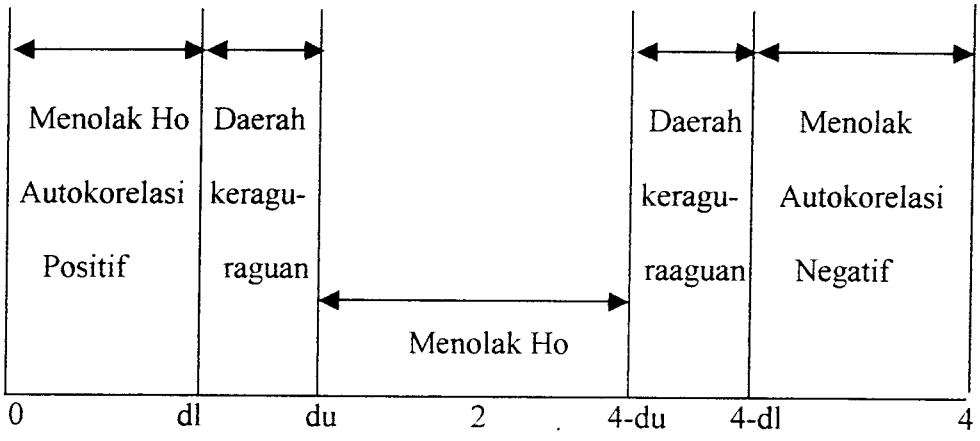

Gambar IV.5

Kriteria Durbin-Watson test adalah:

Jika hipotesis Ho, adalah tidak ada korelasi positif, maka jika

D < dl : menolak Ho

D > du: terima Ha

dl $\leq$ d $\leq$ du: pengujian tidak menyakinkan

Jika hipotesis nol Ho adalah bahwa tidak ada serial korelasi negatif, maka jika

D > 4-dl : menolak Ho

D < 4-dl : tidak menolak Ho

4-du $\leq$ d $\leq$ 4-dl ; pengujian tidak meyakinkan

Jika Ho adalah dua-ujung, yaitu bahwa tidak ada autokorelasi baik positif atau negatif.

b. Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi karena adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi yang disebabkan kesalahan data baik difinisi atau ukuran, jumlah sample terlalu kecil *(Central Limit Theori)*, adanya lag dan hubungan antar variabel pada data makroekonomi, koefisien determinasi dapat tinggi.

Tujuan uji multikolinearitas untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier sempurna di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi atau untuk menunjukkan adanya derajat kolinieritas yang tinggi di

antara variabel-variabel bebas. Multikoliniearitas dapat diketahui dengan melihat R^2.

Multikolinearitas akan menjadi masalah bila derajad multikolinearitasnya tinggi (0,875 – 1). Jika derajat multikolinearitas rendah maka multikolinearitas yang terjadi tidak terlalu membahayakan bagi interprestasi hasil regresi. Dengan metode yang dikemukakan Klein, derajat kolinearitas antara variabel independen dengan variabel independen yang lain. Jika ditentukan r^2 (parsial) yang lebih besar dari R^2 (serempak/semua) maka terdapat multikolinearitas dan sebaliknya.

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila kesalahan pengganggu tidak mempunyai varian yang sama untuk seluruh observasi yang disebabkan kesalahan pengambilan sample, kesalahan bentuk fungsi, variabel tidak lengkap dan kesalahan definisi variabel sehingga mengakibatkan varian residual tinggi disamping itu juga uji statistik menjadi tidak valid.

Uji ini digunakan menguji apakah faktor-faktor pengganggu mempunyai varian yang sama/tidak. Ada beberapa metode salah satunya metode Glejser test. Setelah mendapatkan residual ei dari regresi OLS, Glesjer menyarankan untuk meregresi nilai absolut dari

ei, $|ei|$, terhadap variabel X yang diperkirakan mempunyai hubungan yang erat dengan σi^2. Dalam percobaanya, Glesjer menggunakan bentuk fungsional berikut (Gujarati, 1995:187).

$$|ei| = \beta o + \beta 1\ Xi + vi$$

$$|ei| = \sqrt{\beta o + \beta 1 Xi + vi}$$

di mana vi adalah unsur kesalahan

4.3. Hipotesis

Hipotesa didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk argumentasi atau mengutarakan pendapat meskipun kebenaran pendapat tersebut bersifat sementara, tentang perilaku variabel dalam model yang digunakan dan akan dibuktikan kebenarannya melalui uji statistik maupun ekonometri.

Agar penelitian tidak menyimpang dari judul, arah dan tujuan penelitian, maka ditarik hipotesa sebagai berikut:

1. Diduga PDB riil berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran pemerintah.
2. Diduga jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap defisit anggaran pemerintah.
3. Diduga utang luar negeri berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap defisit anggaran pemerintah.

BAB V

ANALISA DATA

Dalam bab ini akan dilakukan pengolahan data-data yang digunakan dalam penaksiran model dan akan disajikan mengenai data hasil penelitian dengan pembahasannya serta interprestasi hasil. Data yang digunakan meliputi data sekunder melalui riset kepustakaan *(Library Research)*. Data tersebut berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN yaitu data defisit anggaran, PDB riil, Jumlah penduduk dan Utang luar negeri. Analisa data akan berkisar pada pembahasan hasil studi empiris model OLS dengan metode regresi log linear berganda serta melihat apakah asumsi-asumsi klasik dari model regresi log linear terpenuhi, yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskesdatisitas, uji autokorelasi.

5.1. Diskripsi Data

Telah disebutkan bahwa data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk pencatatan dari Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN. Data-data tersebut disusun mulai tahun 1985 sampai tahun 2001 untuk kemudian di masukkan kedalam beberapa variabel. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah:

1. Defisit Anggaran

   Data yang digunakan adalah defisit anggaran dari tahun 1985-2001 yang berasal dari buku Nota Keuangan dan RAPBN dengan satuan Milyar Rupiah.

2. PDB riil

   Data PDB riil diperoleh dari hasil pengolahan dan pencatatan pada buku Statistik Indonesia mulai tahun 1985 sampai dengan 2001, dan disetarakan dengan tahun dasar 1993 dalam Milyar Rupiah.

3. Jumlah Penduduk

   Data Jumlah penduduk diperoleh dari hasil dan pencatatan pada buku Statistik Indonesia mulai tahun 1985 sampai dengan 2001 dengan satuan Juta Jiwa

4. Utang luar negeri.

   Data Utang luar negeri diperoleh dari hasil dan pencatatan pada data-data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia mulai tahun 1985 sampai 2001 dengan satuan Juta US$.

Dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi log linear

Model yang digunakan:

LnY : f(LnX1, LnX2, LnX3)

LnY : $\beta o + \beta 1.LnX1 + \beta 2.LnX2 + \beta 3.LnX3 + ei$

Keterangan :

LnY : Defisit Anggaran (Milyar Rupiah)

LnX1 : PDB riil (Milyar Rupiah)

LnX2 : Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)

LnX3 : Utang luar negeri (Juta US$)

5.2. Analisi Data

Berdasarkan perhitungan komputer melalui program *Eviews* 3 dengan metode *Ordinary Least Squares* dengan model regresi log linear berganda diperoleh hasil:

Tabel 5.1.

Hasil Estimasi Persamaan Regresi

Dependent Variable: Ln(Y)
Method: Least Squares
Date: 02/09/04 Time: 16:26
Sample: 1985 2001
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.421698	12.66378	-0.507092	0.6206
Ln(X1)	-6.520928	0.854707	-7.629427	0.0000
Ln(X2)	11.55734	3.774600	3.061872	0.0091
Ln(X3)	3.369735	0.609590	5.527868	0.0001
R-squared	0.957370	Mean dependent var		9.623746
Adjusted R-squared	0.947532	S.D. dependent var		0.966879
S.E. of regression	0.221472	Akaike info criterion		0.025285
Sum squared resid	0.637650	Schwarz criterion		0.221336
Log likelihood	3.785074	F-statistic		97.31595
Durbin-Watson stat	1.717534	Prob(F-statistic)		0.000000

5.3. Pengujian Hipotesis

5.3.1. Pengujian Hipotesis Parsial (uji t-test)

Uji untuk mengetahui adanya hubungan yang berarti/signifikan antara variabel penjelas dengan variabel yang dijelaskan secara parsial/individu dapat diketahui dengan cara menggunakan uji t statistik. Dengan menggunakan uji t statistik pada derajad kepercayaan tertentu maka tingkat signifikasi hubungan variabel yang dijelaskan terhadap variabel penjelas dapat diukur.

Pengujian secara individual/parsial menggunaka uji satu sisi (*one tail test*) positif dan negatif dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Uji satu sisi positif :

   Hipotesis yang digunakan :

   $Ho = \beta 1 \leq 0$; $Ha = \beta 1 > 0$

   Kriteria penerimaan :

   Ho diterima jika t-hitung < t-tabel, secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

   Ho ditolak jika t-hitung > t-tabel, secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji satu sisi negatif

   Hipotesis yang digunakan :

   $Ho = \beta 1 \geq 0$; $Ha = \beta 1 < 0$

Kriteria penerimaan :

Ho diterima jika t-hitung > t-tabel, secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ho ditolak jika t-hitung < t-tabel, secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Dengan menggunakan tabel distribusi t, maka nilai t tabel pada Degree of Freedom (DF) = 17 dan derajad kepercayaan (α) : 5% diperoleh t tabel sebesar: 1,771

Sedang pengujian yang dilakukan meliputi:

a. Pengujian terhadap parameter β1

Dari hasil print out komputer diketahui t hitung sebesar -7,62 dan t tabel sebesar -1,771 (α=5%) maka dengan pengujian satu sisi negatif, -7,62 < -1,771; t hitung>t tabel sehingga Ho ditolak berarti pada tingkat keyakinan 95% PDB riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran.

b. Pengujian terhadap parameter β2

Diketahui t hitung sebesar 3,06 dan t tabel sebesar (α=5%) maka dengan pengujian satu sisi positif , 3,06 > 1,771; t hitung>t tabel sehingga Ho ditolak berarti pada tingkat keyakinan 95% Jumlah Penduduk secara individu/parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap defisit anggaran.

c. Pengujian terhadap parameter β3

Diketahui t hitung sebesar 5,52 dan t tabel sebesar 1,771 (α=5%) maka dengan pengujian satu sisi positif , 5,52 > 1,771; t hitung>t tabel sehingga Ho diterima berarti pada tingkat keyakinan 95% Utang luar negeri secara individu/parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap defisit anggaran.

5.3.2. Pengujian Hipotesis Secara Serempak/Keseluruhan (Uji F/F-test)

Hipotesis yang digunakan:

Ho = β1 = β2 = β3 ⟶ secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh F hitung < F tabel terhadap variabel dependen.

Ha = β1≠ β2 ≠ β3 ⟶ secara bersama-sama variabel independen berpengaruh F hitung > F tabel terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan α=5% (n=17; k=4); dk pembilang (k-1)= 3; dk penyebut (n-k)= 14 maka didapat F tabel sebesar 3,34.

Diketahui dari hasil print out komputer didapatkan nilai F hitung sebesar 97,31 dan F tabel sebesar 3,34. Karena F hitung > F tabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara bersama-sama PDB riil, Jumlah Penduduk, Utang luar negeri berpengaruh terhadap defisit anggaran.

5.3.3. Pengujian koefisien $\overline{R}^2$

Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara serempak dapat dilihat besarnya $\overline{R}^2$. Dari hasil olahan data diperoleh $\overline{R}^2$ sebesar 0,9475 yang berarti variable independen mampu menjelaskan sebesar 94,75% terhadap variabel dependennya (defisit anggaran) sementara sisanya 5,25% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

5.4. Pengujian Asumsi Klasik

5.4.1. Uji Multikolinearitas

Multikolineritas merupakan keadaan terdapatnya hubungan antar variabel bebas pada model regresi dengan kata lain variabel independen yang satu merupakan fungsi yang lainnya.. Selanjutnya untuk mendeteksi lebih jauh ada tidaknya multikolinearitas digunakan uji Klein. Dari hasil uji Klein untuk mengetahui r^2 parsial dari masing-masing hubungan variabel independen tersebut lebih besar atau lebih kecil dari nilai $\overline{R}^2$ keseluruhan, jika $r^2 > \overline{R}^2$ maka terdapat multikolinearitas dan $r^2 < \overline{R}^2$ tidak terdapat multikolinearitas. Dari regresi tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Antara PDB riil dengan jumlah penduduk diperoleh r^2 sebesar 0,9181 sehingga lebih kecil dari $\overline{R}^2$, disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

2. Antara PDB riil Indonesia dengan utang luar negeri diperoleh r^2 sebesar 0,9239 sehingga lebih kecil dari $\overline{R}^2$, disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.
3. Antara jumlah penduduk dengan utang luar negeri diperoleh r^2 sebesar 0,9538 sehingga lebih besar dari $\overline{R}^2$, disimpulkan ada indikasi terdapat multikolinearitas.

Melihat koefisien korelasi yang begitu besar antara jumlah penduduk dan utang luar negeri maka dinyatakan terdapat multikolinearitas namun jika dilihat dari koefisien parameter signifikan maka koefisien parameter tetap dinyatakan BLUE *(Best Linear Unbiased Estimator)*.

Tabel 5.2.

Uji Multikolinearitas metode Klein

	r^2	$\overline{R}^2$	Keputusan
LnX1, LnX2	0,9181	0,9475	Tidak ada multikolinearitas
LnX1, LnX3	0,9239	0,9475	Tidak ada multikolinearitas
LnX2, LnX3	0,9538	0,9475	Terdapat multikolinearitas

5.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunaka uji Glesjer. Dengan meregresi nilai residual sebagai variabel dependen terhadap seluruh variabel-variabel independen maka hipotesis yang menyatakan jika hasil perhitungan menghasilkan nilai t hitung > t tabel dikatakan terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Hasil pengujian Glesjer dapat ditampilkan pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3.

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T hitung	T tabel α=5%	Kesimpulan
LnX1	-0,5618	1,771	Tidak ada hetesoskesdastisitas
LnX2	-0,9477	1,771	Tidak ada hetesoskesdastisitas
LnX3	1,4961	1,771	Tidak ada hetesoskesdastisitas

5.4.3. Uji Autokorelasi

Uji ini dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar data dalam satu variabel atau hubungan antar residual dalam sebuah hasil regresi. Dengan uji Durbin-Watson ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat.

Dari hasil regresi setelah menghilangkan variabel Dm diperoleh nilai DW hitung = 1,7175 dan nilai DW tabel (α = 5%; k= 3; n = 17) diperoleh titik-titik dl = 0,90; du = 1,71 ; 4-du = 2,29

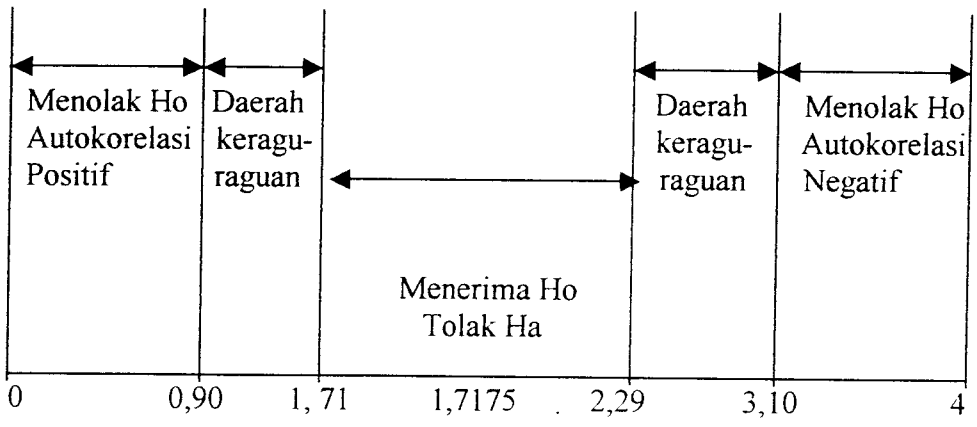

Gambar V.1

Hasil pengujian Durbin-Watson dapat kita interprestasikan bahwa d-test:

$$du < d < 4-du$$

Berarti Ho diterima artinya tidak ada serial korelasi baik positif maupun negatif dalam model.

5.5. Interprestasi

$$LnY = Ln -6,4216 -6,5209\ LnX1 + 11.5573\ LnX2 + 3,3697\ LnX3$$

Dari hasil estimasi atau persamaan yang didapat, maka hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Variabel X1, mempunyai parameter negatif sebesar (-6,52) yang berarti setiap ada kenaikan PDB riil sebesar 1% akan menyebabkan turunnya defisit anggaran sebesar 6,52% dengan asumsi variabel lainnya tetap, sehingga memenuhi hipotesis awal yang menyatakan bahwa PDB rill berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran pemerintah, sementara hasil regresi menyatakan negatif dan signifikan secara statistik maka dianggap variabel X1 berpengaruh.
2. Variabel X2, mempunyai parameter positif sebesar (11,55) yang berarti setiap ada kenaikan Jumlah penduduk Indonesia sebesar 1% akan menyebabkan naiknya defisit anggaran sebesar 11,55% dengan asumsi variabel lainnya tetap, sehingga memenuhi hipotesis awal yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap defisit anggaran pemerintah, Sementara hasil regresi menyatakan positif dan signifikan secara statistik maka dianggap variabel X2 berpengaruh.

3. Variabel X3, mempunyai parameter positif sebesar (3,36) yang berarti setiap ada kenaikan utang luar negeri sebesar 1% akan menyebabkan naiknya defisit anggran sebesar 3,36% dengan asumsi variabel lainnya tetap, sehingga memenuhi hipotesis awal yang menyatakan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif terhadap defisit anggaran pemerintah, Sementara hasil regresi menyatakan positif dan signifikan secara statistik maka dianggap variabel X3 berpengaruh.
4. Hasi uji F yang digunakan untuk menguji secara serempak semua koefisien regresi, menyatakan bahwa variabel independen (PDB riil, Jumlah penduduk, Utang luar negeri) secara serempak mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel dependen (defisit anggaran pemerintah) pada tingkat signifikan 5%. Hal ini terlihat dari nilai statistik F hitung sebesar 97,31 dengan probabilitas F statistik sebesar 0,0000 maka dapat dikatakan bahwa secara statistik semua koefisien regresi tersebut signifikan.
5. Nilai statistik koefisien determinasi yang telah disesuaikan *(adjusted R square)* yang diperoleh dari hasil regresi adalah sebesar 0,947532. Ini berarti bahwa 94,75% variasi variabel Defisit anggaran pemerintah dapat dijelaskan oleh variasi variabel PDB riil, Jumlah Penduduk dan Utang luar negeri. Sedangkan sisanya 5,25% dijelaskan variasi diluar model.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan regresi log linear serta analisa penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi Defisit Anggaran Pemerintah dipengaruhi oleh PDB riil, jumlah penduduk, dan utang luar negeri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Defisit Anggaran Pemerintah secara negatif dan signifikan dipengaruhi oleh PDB riil.

b) Sedangkan variabel jumlah penduduk dan utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan secara statistik.

c) Berdasarkan Uji F maka secara bersama-sama variabel PDB riil, jumlah penduduk, dan utang luar negeri secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel Defisit Anggaran Pemerintah.

d) Berdasarkan koefisien determinasi yang telah disesuaikan *(adjust R square)* yang diperoleh dari nhasil regresi adalah sebesar 0,9475 yang berarti variabel PDB riil, jumlah penduduk, dan utang luar negeri mampu menjelaskan variabel Defisit Anggaran Pemerintah sebesar 94,75%

sedangkan sisanya 5,25 % dijelaskan oleh variabel lain maka model ini dianggap baik untuk menjelaskan penelitian.

e) Berdasarkan uji diagnosa/asumsi klasik model yang digunakan ini terbebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

6.2. Saran

1. Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan kenaikan pendapatan nasional riil berperan besar terhadap penurunan defisit anggaran pemerintah, sektor penerimaan yang dibiayai oleh pajak akan meningkat dengan meningkatnya pendapatan nasional riil, dikarenakan sistem perpajakan yang mempunyai sifat *built in flexibility* sehingga untuk tetap menjaga defisit anggaran tidak terus meningkat maka diharapkan pemerintah dapat meningkatkan dan mempertahankan pendapatan nasional riil sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga.
2. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ketahun semakin tinggi, pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut tidak diiringi dengan perbaikan taraf hidup masyarakat. Sehingga dengan semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka beban yang ditanggung pemerintah semakin besar dan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa proyek pembangunan, program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran tentu saja akan mendorong defisit anggaran semakin tinggi sehingga tindakan yang harus dilakukan pemerintah adalah menghambat laju pertumbuhan

penduduk dengan melakukan program KB mandiri, dan menggerakkan sektor riil agar pengangguran tidak terus meningkat.

3. Utang luar negeri mempunyai pengaruh positif terhadap defisit anggaran, untuk tetap menjaga agar defisit anggaran tidak terus meningkat maka pemerintah harus waspada terhadap masuknya utang luar negeri meskipun utang luar negeri banyak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan program/proyek pemerintah namun jika dilihat efeknya defisit anggaran semakin tinggi dan dengan demikian beban pemerintah untuk membayar dan menanggung utang semakin berat

DAFTAR PUSTAKA

Anton, H. Gunawan, *Anggaran Inflasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, BPS, Berbagai Tahun Penerbitan, Jakarta.

Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Berbagai Tahun Penerbitan, Jakarta.

Departemen Keuangan, *Nota Keuangan dan RAPBN*, Berbagai Tahun Penerbitan, Jakarta.

Dornbusch, R. and S. Fischer, *Makroekonomi*, Edisi keempat, Erlangga, Jakarta, 1990.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1997.

Gujarati, Damador, *Ekonometrika Dasar*, (Terjemahan Sumarno zain), Erlangga, Jakarta, 1995.

Kuncoro, Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan Teori dan Kebijakan*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2003.

LPE-IBII, *Makro Ekonomi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

Nopirin, *Ekonomi Moneter*,Edisi Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta, 1987.

Reksoprayitno, Soediyono, *Pengantar Ekonomi Mak*ro, Edisi keenam, BPFE UGM, Yogyakarta, 2000.

Hamid, Edy Suandi, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isyu-isyu Ekonomi Politik Indonesia*, Ekonisia, Yokyakarta, 2001.

Lampiran 1

Data Linear

obs	Y (Defisit Anggaran M Rp)	X1 (PDB Riil M Rp)	X2 (Jumlah Penduduk Juta Jiwa)	X3 (Utang Luar Negeri US $)
1985	3572.000	200857.7	163.3900	35157.00
1986	5751.000	212633.2	166.9400	41592.00
1987	6156.000	223107.4	170.1800	49529.00
1988	9385.000	236004.1	175.5900	50720.00
1989	9426.000	253601.9	179.1400	52400.00
1990	9903.000	271968.1	179.3000	63953.00
1991	10407.00	291563.4	181.3800	65697.00
1992	10714.00	309659.1	184.4900	73360.00
1993	10752.00	329775.8	187.3000	80592.00
1994	10983.00	354640.8	190.6800	96500.00
1995	11789.00	383792.3	193.7500	106831.0
1996	12413.00	413797.9	196.8100	110171.0
1997	23817.00	433245.9	197.8100	136088.0
1998	114585.6	376374.9	200.7500	150886.0
1999	83495.20	379557.7	202.8300	148098.0
2000	44134.00	397666.3	205.8400	141693.0
2001	52529.00	411132.0	208.9000	133074.0

Lampiran 2

Data Log Linear

obs	Ln(Y) (Defisit Anggaran M Rp)	Ln(X1) (PDB Riil M Rp)	Ln(X2) (Jumlah Penduduk Juta Jiwa)	Ln(X3) (Utang Luar Negeri
1985	8.180881	12.21035	5.096140	10.46758
1986	8.657129	12.26732	5.117634	10.63566
1987	8.725182	12.31541	5.136857	10.81031
1988	9.146868	12.37160	5.168152	10.83408
1989	9.151227	12.44352	5.188168	10.86666
1990	9.200593	12.51344	5.189060	11.06590
1991	9.250234	12.58301	5.200594	11.09281
1992	9.279307	12.64323	5.217595	11.20313
1993	9.282847	12.70617	5.232712	11.29715
1994	9.304104	12.77886	5.250597	11.47730
1995	9.374922	12.85786	5.266569	11.57900
1996	9.426500	12.93313	5.282239	11.60979
1997	10.07815	12.97906	5.287307	11.82106
1998	11.64908	12.83834	5.302060	11.92428
1999	11.33254	12.84676	5.312368	11.90563
2000	10.69499	12.89337	5.327099	11.86142
2001	10.86912	12.92667	5.341856	11.79866

Hasil Estimasi

Dependent Variable: Ln(Y)
Method: Least Squares
Date: 04/04/04 Time: 07:36
Sample: 1985 2001
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.421698	12.66378	-0.507092	0.6206
Ln(X1)	-6.520928	0.854707	-7.629427	0.0000
Ln(X2)	11.55734	3.774600	3.061872	0.0091
Ln(X3)	3.369735	0.609590	5.527868	0.0001

R-squared	0.957370	Mean dependent var	9.623746
Adjusted R-squared	0.947532	S.D. dependent var	0.966879
S.E. of regression	0.221472	Akaike info criterion	0.025285
Sum squared resid	0.637650	Schwarz criterion	0.221336
Log likelihood	3.785074	F-statistic	97.31595
Durbin-Watson stat	1.717534	Prob(F-statistic)	0.000000

Coeficient Covariance Matrix

	C	Ln(X1)	Ln(X2)	Ln(X3)
C	160.3714	-1.261092	-42.76900	7.011157
Ln(X1)	-1.261092	0.730525	-1.059717	-0.215742
Ln(X2)	-42.76900	-1.059717	14.24760	-1.621987
Ln(X3)	7.011157	-0.215742	-1.621987	0.371600

Obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1985	8.18088	8.12626	0.05462	| . | * . |
1986	8.65713	8.56957	0.08756	| . | * . |
1987	8.72518	9.06670	-0.34152	|* . | . |
1988	9.14687	9.14201	0.00486	| . * . |
1989	9.15123	9.01418	0.13704	| . | * . |
1990	9.20059	9.23996	-0.03936	| . *| . |
1991	9.25023	9.01024	0.23999	| . | * |
1992	9.27931	9.18584	0.09347	| . | * . |
1993	9.28285	9.26694	0.01591	| . |* . |
1994	9.30410	9.60665	-0.30255	| * . | . |
1995	9.37492	9.61884	-0.24392	| *. | . |
1996	9.42650	9.41281	0.01369	| . |* . |
1997	10.0782	9.88381	0.19434	| . | *. |
1998	11.6491	11.3198	0.32930	| . | . *|
1999	11.3325	11.3212	0.01139	| . * . |
2000	10.6950	11.0385	-0.34352	|* . | . |
2001	10.8691	10.7804	0.08870	| . | * . |

Uji Multikolinearitas Metode Klein

Uji 1

Dependent Variable: Ln(X1)
Method: Least Squares
Date: 02/09/04 Time: 16:32
Sample: 1985 2001
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.641570	1.287443	-3.605263	0.0026
Ln(X2)	3.306620	0.246122	13.43489	0.0000

R-squared	0.923272	Mean dependent var	12.65342
Adjusted R-squared	0.918157	S.D. dependent var	0.256926
S.E. of regression	0.073502	Akaike info criterion	-2.272879
Sum squared resid	0.081038	Schwarz criterion	-2.174854
Log likelihood	21.31947	F-statistic	180.4961
Durbin-Watson stat	0.585513	Prob(F-statistic)	0.000000

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1985	12.2104	12.2094	0.00092	
1986	12.2673	12.2805	-0.01318	
1987	12.3154	12.3441	-0.02866	
1988	12.3716	12.4475	-0.07594	
1989	12.4435	12.5137	-0.07021	
1990	12.5134	12.5167	-0.00324	
1991	12.5830	12.5548	0.02819	
1992	12.6432	12.6110	0.03219	
1993	12.7062	12.6610	0.04515	
1994	12.7789	12.7202	0.05870	
1995	12.8579	12.7730	0.08488	
1996	12.9331	12.8248	0.10834	
1997	12.9791	12.8415	0.13751	
1998	12.8383	12.8903	-0.05199	
1999	12.8468	12.9244	-0.07765	
2000	12.8934	12.9731	-0.07976	
2001	12.9267	13.0219	-0.09525	

Uji 2

Dependent Variable: Ln(X1)
Method: Least Squares
Date: 02/09/04 Time: 16:32
Sample: 1985 2001
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.816262	0.417833	16.31338	0.0000
Ln(X3)	0.516158	0.036916	13.98191	0.0000

R-squared	0.928739	Mean dependent var	12.65342
Adjusted R-squared	0.923988	S.D. dependent var	0.256926
S.E. of regression	0.070835	Akaike info criterion	-2.346794
Sum squared resid	0.075264	Schwarz criterion	-2.248769
Log likelihood	21.94775	F-statistic	195.4938
Durbin-Watson stat	0.900124	Prob(F-statistic)	0.000000

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1985	12.2104	12.2192	-0.00884	
1986	12.2673	12.3059	-0.03862	
1987	12.3154	12.3961	-0.08069	
1988	12.3716	12.4084	-0.03676	
1989	12.4435	12.4252	0.01834	
1990	12.5134	12.5280	-0.01458	
1991	12.5830	12.5419	0.04111	
1992	12.6432	12.5989	0.04437	
1993	12.7062	12.6474	0.05879	
1994	12.7789	12.7404	0.03850	
1995	12.8579	12.7929	0.06500	
1996	12.9331	12.8088	0.12438	
1997	12.9791	12.9178	0.06126	
1998	12.8383	12.9711	-0.13274	
1999	12.8468	12.9615	-0.11469	
2000	12.8934	12.9386	-0.04526	
2001	12.9267	12.9062	0.02043	

Uji 3

Dependent Variable: Ln(X2)
Method: Least Squares
Date: 02/09/04 Time: 16:32
Sample: 1985 2001
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.508822	0.094613	37.08621	0.0000
Ln(X3)	0.152234	0.008359	18.21161	0.0000

R-squared	0.956730	Mean dependent var	5.230412
Adjusted R-squared	0.953846	S.D. dependent var	0.074660
S.E. of regression	0.016040	Akaike info criterion	-5.317375
Sum squared resid	0.003859	Schwarz criterion	-5.219350
Log likelihood	47.19769	F-statistic	331.6628
Durbin-Watson stat	1.077380	Prob(F-statistic)	0.000000

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1985	5.09614	5.10234	-0.00620	. * | .
1986	5.11763	5.12793	-0.01030	. * | .
1987	5.13686	5.15452	-0.01766	* . | .
1988	5.16815	5.15814	0.01002	. | * .
1989	5.18817	5.16310	0.02507	. | . *
1990	5.18906	5.19343	-0.00437	. * | .
1991	5.20059	5.19752	0.00307	. |* .
1992	5.21760	5.21432	0.00328	. |* .
1993	5.23271	5.22863	0.00408	. |* .
1994	5.25060	5.25606	-0.00546	. * | .
1995	5.26657	5.27154	-0.00497	. * | .
1996	5.28224	5.27623	0.00601	. | * .
1997	5.28731	5.30839	-0.02108	* . | .
1998	5.30206	5.32410	-0.02204	* . | .
1999	5.31237	5.32126	-0.00889	. * | .
2000	5.32710	5.31453	0.01257	. | * .
2001	5.34186	5.30498	0.03688	. | . *

Uji Heteroskedastisitas Metode Glesjer

Dependent Variable: ARES2
Method: Least Squares
Date: 02/09/04 Time: 16:29
Sample: 1985 2001
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.486514	7.295321	1.163282	0.2656
Ln(X1)	-0.276621	0.492378	-0.561807	0.5838
Ln(X2)	-2.060737	2.174462	-0.947700	0.3606
Ln(X3)	0.525404	0.351171	1.496147	0.1585

R-squared	0.178602	Mean dependent var	0.149514
Adjusted R-squared	-0.010951	S.D. dependent var	0.126892
S.E. of regression	0.127585	Akaike info criterion	-1.077741
Sum squared resid	0.211614	Schwarz criterion	-0.881690
Log likelihood	13.16080	F-statistic	0.942225
Durbin-Watson stat	3.091736	Prob(F-statistic)	0.448541

Coevicient Covariance Matrix

	C	Ln(X1)	Ln(X2)	Ln(X3)
C	53.22171	-0.418513	-14.19355	2.326760
Ln(X1)	-0.418513	0.242436	-0.351683	-0.071597
Ln(X2)	-14.19355	-0.351683	4.728286	-0.538281
Ln(X3)	2.326760	-0.071597	-0.538281	0.123321

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1985	0.05462	0.10677	-0.05215	. * .
1986	0.08756	0.13503	-0.04747	. * .
1987	0.34152	0.17388	0.16764	. . *
1988	0.00486	0.10632	-0.10146	. * .
1989	0.13704	0.06230	0.07474	. . * .
1990	0.03936	0.14581	-0.10644	. * .
1991	0.23999	0.11693	0.12307	. . * .
1992	0.09347	0.12320	-0.02974	. * .
1993	0.01591	0.12404	-0.10813	. * .
1994	0.30255	0.16172	0.14083	. . *
1995	0.24392	0.16039	0.08352	. . * .
1996	0.01369	0.12345	-0.10977	. * .
1997	0.19434	0.21130	-0.01696	. * .
1998	0.32930	0.27406	0.05524	. . * .
1999	0.01139	0.24069	-0.22930	* . .
2000	0.34352	0.17421	0.16930	. . *
2001	0.08870	0.10162	-0.01292	. * .